



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



# **Panduan Praktis Memahami Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk Kementerian / Lembaga**





# **Panduan Praktis Memahami dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Untuk Kementerian/Lembaga**



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
2016



# Daftar Isi

Pengantar	1
Bagian I : Konsep Gender	2
Bagian 2 : Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	8
Bagian 3 : Instrumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	15
Bagian 4 : Pengalaman Kementerian/Lembaga di Dalam Melaksanakan PPRG	25
Lampiran	31

# Daftar Istilah

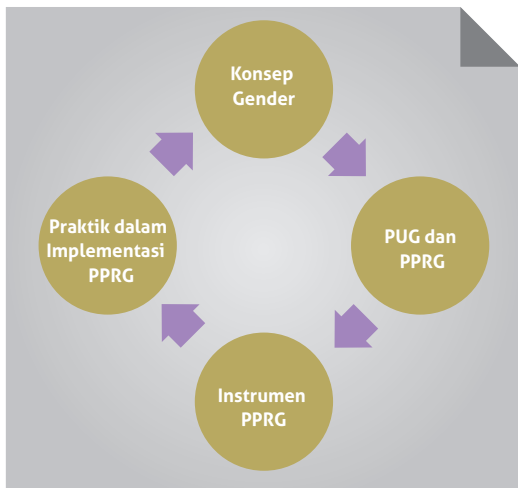
GAP	: Gender Analysis Pathway
GBS	: Gender Budget Statement
PUG	: Pengarusutamaan Gender
PPRG	: Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Renja K/L	: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renstra K/L	: Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKA K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

# Pengantar

Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah memandatkan tiga strategi pengarusutamaan, yaitu:

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. *Pengarusutamaan Gender (PUG)*

Strategi Pengarusutamaan Gender dilakukan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Dalam mempelajari PPRG, maka ada 4 hal yang perlu diketahui, yaitu:



# Bagian 1

## Konsep Gender



### **Apakah Gender itu?**

Pembedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

### **Apa perbedaan gender dengan seks (jenis kelamin)?**

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan konstruksi biologis, universal, tidak dapat diubah karena merupakan kodrat. Misalnya, laki-laki memiliki sperma dan perempuan memiliki sel telur (ovum).



Sedangkan gender adalah konstruksi sosial sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya: dulu, pekerjaan mengasuh dan menggendong bayi dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Namun sekarang, banyak laki-laki yang mengasuh dan menggendong bayi dengan senang hati.

### ***Mengapa perlu membedakan antara gender dengan jenis kelamin?***

Pembedaan gender dan jenis kelamin perlu dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa baik **laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki potensi dan kemampuan yang sama dan keduanya perlu berpartisipasi aktif di dalam pembangunan**. Sayangnya, kondisi ini belum terjadi karena masih banyak pandangan di masyarakat yang tidak tepat. Misalnya, perempuan dianggap memiliki karakter perasa dan lembut sehingga dianggap tidak bisa menjadi pemimpin, sedangkan laki-laki dianggap memiliki karakter keras dan kaku sehingga dianggap kurang tepat jika melakukan pengasuhan anak. Pandangan seperti ini mengakibatkan ketidakadilan gender sehingga pada akhirnya perempuan dan laki-laki belum mendapatkan manfaat yang sama dari proses pembangunan.

### ***Apa yang dimaksud dengan ketidakadilan gender?***

Ketidakadilan gender adalah bentuk-bentuk perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan karena adanya

pembedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Peran gender antara laki-laki dan perempuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe: reproduksi (domestik/keluarga), produksi dan peran dalam masyarakat (*community*):

Peran	Reproduksi	Produksi	Masyarakat
Perempuan	Peran utama: ✓ Ibu ✓ Istri	Sering kali diasumsikan tidak ada atau hanya sebagai penghasil/pencari uang tambahan	Pengelolaan masyarakat layanan sukarela (perluasan dari peran reproduksi, sering kali informal dan biasanya tidak dibayar)
Laki-laki	Ayah	Pencari nafkah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kepemimpinan</li> <li>✓ Politik</li> <li>✓ Pertahanan (sering kali bersifat formal dan dibayar)</li> </ul>

Pembedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan lima bentuk ketidakadilan gender, yaitu: stereotipe / pelabelan, subordinasi, marginalisasi, Diskriminasi dan beban ganda

### *Apa akibat dari ketidakadilan gender yang terjadi?*

Ketidakadilan gender mengakibatkan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang diperlakukan karena perbedaan peran serta hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tidak mempunyai kesamaan kondisi dan posisi untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional. Dan lebih jauh lagi, yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan yang seharusnya berdampak seimbang bagi laki-laki dan perempuan.

### *Mengapa gender perlu diperhatikan di dalam proses pembangunan?*

Agar tercipta keadilan dan kesetaraan gender. **Keadilan gender** tercipta dengan cara memperlakukan perempuan dan laki-laki secara adil, yaitu berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Kebutuhan laki-laki dan perempuan sangat terkait dengan peran gendernya. Peran gender mempengaruhi kebutuhan. Pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda yang disebabkan oleh peran gender masing-masing. Sebagai contoh, karena perempuan memiliki peran gender sebagai perawat utama anak, perempuan secara khusus memerlukan kemudahan akses untuk sekolah dan perawatan kesehatan. Sebagai istri,

perempuan memerlukan akses ke air dan sebagai ibu memerlukan akses ke air minum bersih untuk melindungi kesehatan keluarganya. Sebaliknya, laki-laki sepertinya menempatkan prioritas yang lebih tinggi dalam akses ke pasar dan fasilitas terkait peran sebagai penghasil nafkah utama.

**Kesetaraan gender** tercipta ketika laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai **kesamaan kondisi dan posisi** untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional. Dan lebih jauh lagi, yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan yang berdampak seimbang bagi laki-laki dan perempuan.

## Boks: Lima Bentuk Ketidakadilan Gender

### Bentuk Ketidakadilan Gender

#### Pelabelan

Biasanya perempuan dilekatkan sifat negatif yang merugikan: emosional, cerewet, cengeng, penggoda (secara seksual)

#### Marjinalisasi

Marjinalisasi lebih bersifat ekonomis, misalnya dalam pembagian harta warisan laki-laki didahulukan dan memperoleh harta yang bernilai lebih besar daripada perempuan. Upah buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki

#### Subordinasi

Pendidikan perempuan dinomorduakan: semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah perempuan semakin kecil. Data partisipasi sekolah usia 19-24 (2011)

#### Beban Ganda

Peran Domestik  
Peran Produktif  
Peran Sosial

#### Diskriminasi

Diskriminasi dalam hal mendapatkan akses, partisipasi. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki

## Bagian 2

# Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender



### *Apa yang dimaksud dengan Strategi Pengarusutamaan Gender ?*

Inpres No 9/2000 menjelaskan bahwa strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

### *Mengapa Perlu Strategi Pengarusutamaan Gender ?*

Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Strategi PUG dilakukan dengan cara memastikan pembangunan memberikan laki-laki dan perempuan untuk mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.

### *Apa manfaat Mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender?*

Pelaksanaan PUG akan memberikan manfaat, yaitu terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender

### *Bagaimana wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender?*

- a. **Akses:** Kesempatan yang sama yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan akses yang sama bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang usianya, tanpa ada pengecualian
- b. **Partisipasi:** Perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan baik di tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan.

- c. **Kontrol:** perempuan dan laki-laki diikutkan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama peserta perempuan dan laki-laki untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan kesempatan yang sama untuk duduk dalam posisi pimpinan organisasi.
- d. **Manfaat:** pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Contoh: Program pendidikan dan latihan (Diklat) harus memberikan manfaat yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan.

### *Apa keterkaitan antara PUG dan PPRG ?*

Strategi PUG dilaksanakan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berdasarkan Surat Edaran (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Dengan demikian, PPRG merupakan bagian dari pelaksanaan PUG. PPRG dilakukan melalui perencanaan responsif gender dan penganggaran responsif gender.



### ***Apa yang dimaksud dengan Perencanaan Responsif Gender?***

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender .

Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Di pemerintah pusat, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMN, RKP, Renstra K/L, dan Renja K/L.

### ***Apa yang dimaksud Penganggaran Responsif Gender?***

Penganggaran responsif gender adalah kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Penganggaran responsif gender akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) ini direfleksikan dalam dokumen RKA K/L.

### ***Jelaskan prinsip-prinsip Anggaran Responsif Gender?***

1. ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
2. ARG merupakan pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;

3. ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
4. ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;
5. ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan;

Dengan demikian, ARG yang diharapkan adalah setiap program/kegiatan yang terkait dengan pelayanan (*service delivery*), mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional, serta percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana termuat dalam dokumen pembangunan daerah, **haruslah responsif gender**. Sedangkan program/kegiatan responsif gender yang dimaksud adalah:

1. Program/kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender, yaitu:
  - a. Menggunakan data pembuka wawasan
  - b. Program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah yang ingin diatasi
  - c. Mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender
2. Program/kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*)
3. Program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran

memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya.

4. Program/kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya *Gender Budget Statement (GBS)* pada tahap penganggarannya.

### ***Apa manfaat melaksanakan PPRG?***

PPRG merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada *input*, *output*, dan *outcome* pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan mengimplementasikan PPRG, diharapkan perencanaan dan penganggaran daerah dapat:

#### **a. Lebih Ekonomis, Efektif dan Efisien.**

Manfaat ini dapat diperoleh karena pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran, kondisi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan memberikan jawaban yang lebih tepat atas permasalahan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan

siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

**b. Mengurangi Kesenjangan Tingkat Penerima Manfaat Pembangunan (*equity*)**

Manfaat ini bisa diperoleh karena analisis situasi/ analisis gender dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat secara lebih adil.

Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dihasilkan dari PPRG akan menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan.

## Bagian 3

# Instrumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender



### *Bagaimana Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dilakukan?*

PPRG dilakukan melalui **analisis gender** dan **penyusunan GBS (Gender Budget Statement)**. Hasil analisis gender dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran. Analisis gender diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan nasional, yaitu RPJMN dan RKP, maupun di tingkat K/L seperti Renstra K/L dan Renja K/L.

Hasil analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Dalam dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahunan), hasil analisis gender dalam RPJMN dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra K/L, sedangkan dalam perencanaan pembangunan tahunan, isu gender yang ada dalam RKP dijabarkan dalam Renja K/L.

Selanjutnya hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran, yaitu RKA K/L beserta data dukungannya yang disusun berdasarkan Renja K/L, RKP, dan Pagu Anggaran K/L. RKA K/L memuat informasi kinerja dan rincian anggaran. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan di dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA K/L. Penerapan penganggaran responsif gender diletakkan pada **output**, sehingga relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.

### *Apa yang dimaksud Analisis Gender ?*

Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara

keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.

### ***Bagaimana Analisis Gender dilakukan?***

Analisis gender dilakukan dengan menggunakan Gender Analysis Pathway, yang berisi 9 langkah, dengan format sebagai berikut:

## Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan			Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja	
Berisi nama, tujuan, dan sasaran dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang terpilih untuk dianalisis.	Berisi data pembuka wawasan, yang terpilih jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif, atau data terkait isu gender.	Berisi isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (hanya mencantumkan faktor kesenjangan yang relevan).	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Berisi reformulasi tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.	Berisi rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5. Mencakup juga rencana aksi prioritas berikut keluaran dan hasil kegiatan.	Berisi <i>baseline</i> yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Berisi indikator kinerja (baik capaian <i>output</i> maupun <i>outcome</i> ) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.	



### ***Apa yang dimaksud Gender Budget Statement?***

GBS adalah dokumen akuntabilitas - spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian di atas, maka substansi GBS merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan analisis gender.

### ***Siapa yang menyusun Gender Budget Statement?***

GBS disusun oleh setiap K/L, dengan mengidentifikasi program/kegiatan prioritas sesuai dengan sektornya.

### ***Kapan Gender Budget Statement Disusun?***

Gender Budget Statement disusun pada saat penyusunan RKA K/L ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran. Namun, identifikasi program/kegiatan yang akan disusun GBS-nya sudah dilakukan pada saat *trilateral meeting*.

### ***Bagaimana cara menyusun GBS?***

Penyusunan GBS dilakukan setelah analisis gender dengan cara memindahkan hasil analisis gender ke dalam format

GBS. Format GBS ada dua jenis, yaitu: (i) format GBS untuk kegiatan yang memiliki sub-out put; dan (ii) format GBS untuk kegiatan yang tidak memiliki sub-out put.

Format GBS untuk kegiatan yang memiliki sub-out put adalah sebagai berikut

**GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : (Nama Kementerian Negara/Lembaga)  
 Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon I sebagai KPA)  
 Unit Eselon II/Satker : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)

Nama Satker (baik di Pusat atau Daerah) Program	Nama Program hasil restrukturisasi
Kegiatan	Nama Kegiatan hasil restrukturisasi
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender
Output Kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi
Analisis Situasi	<p>Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender.</p> <p>Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantitatif) maka dapat menggunakan data kualitatif berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD)</p> <p>Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu</p> <p><b>Isu gender pada sub-output ...</b>                      (isu/kesenjangan gender yang ada pada suboutput)                      (hanya suboutput yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)</p>

Rencana Aksi (Dipilih hanya sub-output yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua suboutput dicantumkan)	Sub-output	<i>Bagian dari suatu Output. Sub-output ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/ mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi</i>	
	Tujuan Sub-output	<i>Uraian mengenai tujuan adanya sub-output setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analisis Pathway (GAP) maka dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP.</i>	
		Komponen ...	<i>Uraian mengenai tahapan pelaksanaan suboutput</i>
		Anggaran Sub-output ...	Rp. ....
	Sub-output	.....	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	<i>(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)</i>		
Dampak/hasil Output Kegiatan	<i>Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi</i>		

Penanggung Jawab Kegiatan

.....  
NIP/NRP. ....

Sedangkan format GBS untuk kegiatan yang tidak memiliki sub-out put adalah sebagai berikut:

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : (Nama Kementerian Negara/Lembaga)  
 Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon I sebagai KPA)  
 Unit Eselon II/Satker : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/Nama Satker baik di Pusat atau Daerah)

Nama Satker baik di Pusat atau Daerah) Program	Nama Program hasil restrukturisasi	
Kegiatan	Nama Kegiatan hasil restrukturisasi	
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender	
Output Kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi	
Analisis Situasi	<p>Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender.</p> <p>Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantitatif) maka dapat menggunakan data kualitatif berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD)</p> <p>Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu</p> <p><b>Isu gender pada komponen ...</b>                      (isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen inputnya)                      (hanya komponen yang terdapat isu/kesenjangan gendernya)</p>	
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen dicantumkan)	Komponen	Tahapan dari suatu Output. Komponen ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi
	Komponen	.....

Alokasi Anggaran Output kegiatan	<i>(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)</i>
Dampak/hasil Output Kegiatan	<i>Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi</i>

Penanggung Jawab Kegiatan

.....  
NIP/NRP. ....

### **Siapa yang memastikan PPRG dilaksanakan?**

Ada empat kementerian yang disebut "driver" yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PPRG, yaitu:

1. Bappenas berperan dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
2. Kementerian Keuangan berperan dalam perumusan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran K/L bersama dengan Bappenas.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada K/L, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM terkait PUG dan percepatannya melalui PPRG.
4. Kementerian Dalam Negeri, mendorong pelaksanaan PUG melalui PPRG di daerah (Provinsi, Kabupaten / Kota)

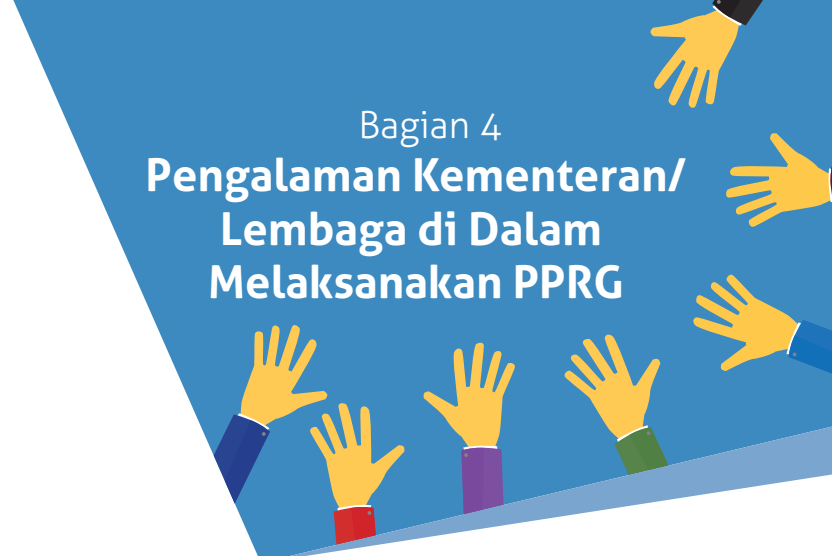
## Boks: Tips Analisis Gender

Dalam melakukan analisis gender, perhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Data pembuka wawasan : berisi data statistik gender yang relevan, bisa berupa data spesifik gender dan data terpilah gender.  
Contoh data spesifik gender banyak terkait dengan indikator SPM bidang kesehatan, misalnya cakupan pelayanan kunjungan K4, cakupan pelayanan nifas.
- Fokuskan analisis ke identifikasi problem dan intervensi ke arah perbaikan pelayanan dasar dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.
- Pastikan bahwa rencana aksi yang disusun merespons masalah yang telah teridentifikasi.
- Lakukan penentuan prioritas dalam menentukan program/kegiatan untuk mengatasi masalah yang telah teridentifikasi di data pembuka wawasan dan faktor penyebabnya dengan mengidentifikasi rencana aksi yang sangat penting, memiliki daya ungkit tinggi, dan memerlukan sumber daya yang tidak terlampau besar.

Dalam proses penyusunan GAP hindari kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Data pembuka wawasan yang ditampilkan tidak relevan. Pastikan bahwa data yang relevan saja yang ditampilkan.
- Persepsi bahwa 50% : 50% antara perempuan dan laki-laki sebagai kondisi yang ideal. Dalam hal kesamaan akses mendapatkan hak atas pendidikan antara perempuan dan laki-laki, kondisi 50%:50% adalah kondisi yang ideal karena ada kesetaraan akses. Artinya, semua anak usia sekolah baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Namun untuk isu kesehatan, kondisi 50%:50% akan menghasilkan ketidaksetaraan. Program/kegiatan dan anggaran untuk merespons kesehatan reproduksi perempuan harus lebih besar karena kebutuhan perempuan terhadap kesehatan lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki karena perempuan mengandung dan melahirkan sementara laki-laki tidak.
- Tidak sinkron antara analisis situasi dengan rencana aksi.
- Analisis gender lebih banyak menyoroti partisipasi laki-laki/perempuan, dibandingkan membahas esensi problem yang perlu diatasi.
- Indikator yang disusun tidak relevan dengan kegiatan yang dilakukan
- Redaksional input, *output* dan *outcome* yang tidak tepat.



## Bagian 4

# Pengalaman Kementerian/ Lembaga di Dalam Melaksanakan PPRG

### *Sejak kapan PPRG dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga?*

Kementerian/Lembaga mulai melaksanakan PPRG sejak tahun 2009, yaitu setelah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010. Setiap tahun, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK serupa dan kewajiban untuk melaksanakan PPRG tetap ada di dalam PMK tersebut. Berdasarkan PMK, tiap Satuan Kerja (Satker) di masing-masing Kementerian/Lembaga menentukan kegiatan apa yang akan disusun GBS-nya dan kemudian GBS



ini diserahkan bersamaan dengan penyerahan dokumen RKA K/L kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan PPRG, maka akan dijelaskan pengalaman Kementerian PU PR dan Kementerian Pertanian agar didapat gambaran langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam melaksanakan PPRG.

### ***Jelaskan pengalaman Kementerian Pekerjaan Umum di dalam melaksanakan PPRG!***

Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) merupakan kementerian yang konsisten dalam penyusunan PPRG. Mulai melakukan analisis pada 2009, Kementerian PU kemudian melanjutkan analisis gender dan penyusunan GBS di tahun anggaran berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2011 ARG Kementerian PU berjumlah Rp. 1,264,409,062,000,00 atau sebesar 2,1% dari total pagu anggaran dan pada tahun Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp.4,034,144,737,000,00 atau sebesar 4,1% dari total pagu anggaran. Demikian juga, dengan cakupannya yang selalu meningkat, dari 13 kegiatan di 2011 hingga 30 kegiatan di Tahun Anggaran 2014, yang meliputi 7 unit organisasi secara konsisten.

### ***Jelaskan pengalaman Kementerian Pertanian didalam melaksanakan PPRG!***

Di Kementerian Pertanian, analisis gender dan penyusunan

GBS dilakukan dengan cukup sistematis sejak Tahun Anggaran 2012 sampai 2014. Pada Tahun Anggaran 2012, PPRG dilakukan oleh 8 unit organisasi dengan 8 kegiatan senilai Rp. 433,511,900,000,00. Di tahun berikutnya, yaitu 2013, cakupan ARG bertambah 2 unit organisasi dengan 2 kegiatan dengan kenaikan anggaran menjadi sebesar Rp. 438,979,500,000,- dan pada Tahun Anggaran 2014, cakupannya tetap 10 unit organisasi tetapi ada satu unit organisasi yang berbeda dengan jumlah anggaran Rp.444,176,600,000,00.

*Jelaskan kunci sukses Kementerian PU PR dan Kementerian Pertanian di dalam melaksanakan PPRG!*

Pelaksanaan PUG telah menjadi landasan pelaksanaan PPRG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Kunci sukses pelaksanaan PPRG di kedua kementerian ini adalah **terlaksananya tujuh prasyarat PUG dengan baik**, yang mencakup:

- (i) **komitmen dan kebijakan.** Kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian PU PR dan Kementerian Pertanian berbentuk Peraturan Menteri terkait Pedoman Pelaksanaan PUG, Surat Keputusan Tim PUG, Rencana Aksi Sektorial dan Data Pilah. Di Tahun 2010 Kementerian Pertanian telah menyusun panduan PPRG sectoral yang membantu penetapan isu-isu gender sectoral dalam penyusunan Gender Analisis Pathway (GAP) dan GBS.

- (ii) **kelembagaan.** Kementerian Pertanian telah membentuk Tim Koordinasi PUG sejak tahun 2003 dan Kementerian PU telah pula membentuk Tim PUG yang berperan aktif di dalam mempromosikan pelaksanaan PUG dan PPRG di kementerian masing-masing.
- (iii) **sumber daya.** Kementerian Pekerjaan Umum secara intensif melakukan capacity building terhadap stafnya, melalui Badan Diklat yang telah mengembangkan modul PPRG dalam dua versi, yaitu versi 31 jam pelajaran (JP) dan 3 JP. Materi 3 JP disisipkan dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh PU. Sampai saat sebagian besar SDM perencana di unit organisasi Kementerian PU sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG.
- (iv) **instrumen dan alat analisis.** Kementerian Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian diperbaharui setiap tahun, menyebutkan pada proses analisis gender, diperlukan piranti/alat untuk menganalisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Pada pelaksanaannya, berbagai metode analisis dikembangkan, antara lain pada kementerian pertanian dengan metode MDS (Multi Dimensional System) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) Responsif Gender. Sedangkan Kementerian

PU PR mengembangkan *Gender Impact Assessment* dan *Gender Checklist*.

- (v) **data pilah.** Kementerian PU PR sudah menyusun data pilah sejak tahun 2010 dan memiliki panduan Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang PU yang responsif gender parameter ini untuk memastikan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PU agar dapat menyiapkan sendiri data terpilah. Sedangkan di Kementerian Pertanian, sejak Tahun 2011 telah mengembangkan data terpilah kepegawaian dan perencana pertanian sampai tingkat provinsi yang difasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
- (vi) **partisipasi masyarakat.** Di Kementerian PU PR, partisipasi masyarakat dilakukan saat melakukan monitoring lapangan agar program/kegiatan berperspektif gender dapat terlaksana.
- (vii) **monitoring dan evaluasi.** Di Kementerian PU PR secara umum sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan di Kementerian Pertanian monitoring dan evaluasi dilakukan berbasis website, yang pada tahun 2012 sudah mengeluarkan buku tentang sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan responsif gender.

Pengalaman-pengalaman ini diharapkan memberikan inspirasi pelaksanaan PPRG di K/L lainnya.

# Lampiran

Contoh GAB dan GBS

Contoh Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)  
**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian X**

Unit Kerja : Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
 (Dana Dekonsentrasi – Provinsi XX)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Kebijakan/ Peraturan/ Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Internal
<p><b>Program</b> Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak</p> <p><b>Kegiatan</b> Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kematian ibu(AKI), di Provinsi XX tercatat dari berbagai sumber : 90,7/100.000 KH . (Dinkes XX, 2010) Angka ini masih dibawah angka target nasional: 118/100,000 KH (Laporan MDGs, 2010) SDKI th 2007: AKI tingkat nasional tercatat: 228 Provinsi XX tercatat 83/100,000 KH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses informasi kesehatan reproduksi/KB bagi laki-laki masih kurang.</li> <li>• Informasi ber kaitan dengan hak perempuan untuk memutuskan hak reproduksinya masih kurang /terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak semua / pengambil keputusan, perencanaan dan pelaksana program serta <i>stakeholder</i> terkait yang memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender serta keterampilan melaksanakan PUG</li> </ul>
<p><b>Tujuan 1 :</b> Meningkatkan capaian KB aktif dari 69,25 % (2010) menjadi 75 % ( 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari berbagai sumber memperlihatkan baik tingkat nasional maupun Provinsi XX AKI masih tinggi .</li> <li>• Beberapa faktor penyebab teridentifikasi:</li> <li>• 60% PUS 4 T di masyarakat (terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering melahirkan, terlalu banyak anak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kegiatan kurang menjangkau sasaran (Unmet need &gt; 8 %)</li> <li>• Program kegiatan kurang mendorong partisipasi suami;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pengelola program belum terpapar dalam Rencana Kehamilan yang Aman (MPS)</li> <li>• Kurangnya kompetensi petugas pelayanan kesehatan kab/kota</li> </ul>

Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan & Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Sebab Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi	Baseline Data	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi lintas unit, / program, sektor yang belum optimal.</li> <li>• Masyarakat lebih nyaman partus di dukun karena konsep mendapat kan pelayanan lengkap dibanding dibidang.</li> </ul>	<p><b>Tujuan (Prov. XX) :</b> Meningkatkan capaian KB aktif dari 69,25% tahun 2010 menjadi 75% tahun 2015 dengan melibatkan dan meningkatkan partisipasi suami/ laki-laki</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terutama KB</li> <li>• Lokakarya bagi petugas kesehatan Kab./ Kota di provinsi tentang pelayanan KB yang berorientasi kepada peningkatan peserta KB, khususnya laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian KB aktif 69,25% (2010) dan Partisipasi suami/ laki-laki</li> <li>• <i>Unmet need</i> &gt; 8 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian KB aktif meningkat menjadi 70 (2011)</li> <li>• Meningkatnya peserta KB suami/laki-laki menjadi 2 (dua)% (2013)</li> <li>• Tersedianya data terpilah, valid, dan <i>up dated</i> yang dimanfaakan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya perhatian pemerintah kab/kota dalam pelayanan KB berkualitas.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu termasuk KB lintas sektor.</li> </ul>		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Kebijakan/ Peraturan/ Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Internal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana prasarana kesehatan belum memadai, belum berfungsi baik</li> <li>Faktor sosial-ekonomi; sosial budaya</li> <li>Anggaran yang jauh dari cukup</li> <li>Anggaran perkapita obat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui DAU sebesar Rp. 2.000/ kapita/tahun. Standar Nasional anggaran perkapita obat sebesar Rp. 9.000/kapita/ tahun.</li> <li>Pelayanan KB memiliki daya ungkit yang tinggi dalam penurunan AKI . Namun Cakupan KB aktif belum mencapai target: Tahun 2010: 69,25% Target Tahun 2015: 75%) dengan rincian (Partisipasi Laki: 1,3% dan wanita : 98,7%),</li> <li>Unmet need &gt; 8 %)</li> <li>Drop Out:4,64%dan sebagai pembanding Drop out KB th 2008: 3,37% (Komposisi laki-laki : 1,72% &amp; wanita : 98,38%).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program kegiatan masih bias gender yang menempatkan isteri sebagai target utama.</li> <li>Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi kurang peka terhadap faktor mendasar yaitu sosial budaya,</li> <li>Karena beberapa alasan yang disebutkan diatas, perempuan/ ibu hamil kurang memanfaatkan dan mendapatkan akses terhadap pelayanan yang tersedia terutama pelayanan KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan (khususnya dalam memanfaatkan ketersediaan data terpilah).</li> <li>Kurangnya alat bantu informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi/ KB.</li> </ul>



Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Kebijakan & Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Sebab Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi	Baseline Data	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan Perempuan dalam menyampaikan kebutuhan kurang terakomodasi .</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Validasi, pemutahiran dan koordinasi ketersediaan datakes ibu KB/ kesehatan reproduksi baik</li> <li>Monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Ibu dan reproduksi, melalui supervisi</li> <li>Pengadaan sarana pendukung program kesehatan reproduksi</li> </ul>		

## **GENDER BUDGET STATEMENT** (Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian X**  
 Unit Organisasi : Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
 Unit Eselon II/Satker : Direktorat Bina Kesehatan Ibu/Dinas Kesehatan Provinsi XX

<b>Program</b>	<b>Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.</b>
<b>Kegiatan</b>	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Meningkatnya cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif di Provinsi XX sebesar 70% di tahun 2011.
<b>Output Kegiatan</b>	Layanan yang mendukung meningkatkan cakupan PUS menjadi peserta KB aktif di Provinsi XX
<b>Analisis Situasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kematian ibu di Propinsi XX tercatat: 0,7/100.000 KH (Dinkes Provinsi XX, 2010). Angka ini masih dibawah target nasional MDGs yaitu: 118/100.000 KH. Sebagai pembandingan: SDKI th 2007, angka kematian Ibu di tingkat nasional tercatat : 228/100.KH, sedangkan Provinsi XX tercatat 83/100.000 KH. Artinya terjadi peningkatan dan mengingat PUS sehingga menjadi ancaman.</li> <li>• Kematian ibu tersebut terjadi karena 3 Faktor penyebab: Faktor terlambat pertolongan (1). Hal ini juga terkait dengan akses informasi &amp; pelayanan berkualitas, termasuk pelayanan KB yang kurang baik pada perempuan maupun laki-laki.</li> <li>• Faktor terlambat merujuk dan terlambat sampai (2 &amp; 3). Hal ini dipengaruhi oleh: pendidikan, ekonomi, budaya, gender dan geografi. Meskipun tingkat melek huruf tidak jauh berbeda antara perempuan dan laki-laki namun kemiskinan dan tingkat pendapatan yang rendah pada perempuan (170.000/bln) menyebabkan perempuan lemah kewenangannya dalam memutuskan (sub-ordinat) meskipun berkaitan dengan kesehatannya. Masih adanya budaya patriaki menyebabkan perempuan/ibu hamil kurang memanfaatkan akses pelayanan kesehatan yang ada termasuk biayanya (marginal).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya anggapan bahwa kesehatan reproduksi/KB uru-san wanita menyebabkan laki-laki kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi/KB. Kurangnya keterlibatan laki-laki (partisipasi) dalam upaya penurunan AKI dalam pengetahuan tanda bahaya kehamilan, informasi perawatan &amp; pengobatan komplikasi kehamilan serta pencegahan KTD melalui upaya pelayanan KB khususnya pelayanan KB pasca salin.</li> <li>• Didalam internal organisasi, isu gender disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Para pengelola program belum terpapar dalam rencana MPS yang sensitif gender.</li> <li>☞ Kordinasi lintas sektor/program kesehatan reproduksi/KB yang belum optimal.</li> <li>☞ Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan khususnya tersedianya data terpilah.</li> <li>☞ Masyarakat lebih nyaman partus di dukun karena konsep mendapatkan pelayanan lengkap di banding bidan.</li> <li>☞ Kurangnya perhatian pemerintah kab./kota dalam pelayanan KB berkualitas,</li> <li>☞ Peran serta masyarat kurang dalam bidang kesehatan karena promosi kesehatan kurang efektif.</li> </ul> </li> </ul>												
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="298 799 474 862"><b>Sub-output 1</b></td> <td data-bbox="474 799 917 862">Koordinasi Pelayanan KB baik di fasilitas Kesehatan kab./kota dan di propinsi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="298 862 474 981"><b>Tujuan/ manfaat</b></td> <td data-bbox="474 862 917 981">Memberikan informasi mengenai inter-vensi dalam mencapai KB aktif 70 % dengan (proporsi laki-laki naik dari 1,3 % menjadi 2%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="298 981 474 1044">Komponen 1</td> <td data-bbox="474 981 917 1044">Pengumpulan data pelayanan KB di fasilitas kesehatan kab./kota</td> </tr> <tr> <td data-bbox="298 1044 474 1079">Komponen 2</td> <td data-bbox="474 1044 917 1079">Pertemuan koordinasi secara periodik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="298 1079 474 1142">Komponen 3</td> <td data-bbox="474 1079 917 1142">Penyusunan rekomendasi untuk perencanaan intervensi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="298 1142 474 1226"><b>Sub-output 2</b></td> <td data-bbox="474 1142 917 1226">Validasi data kesehatan ibu, KB/kesehatan reproduksi mendukung pencapaian MDGs 5 baik di kab./kota maupun di provinsi.</td> </tr> </table>	<b>Sub-output 1</b>	Koordinasi Pelayanan KB baik di fasilitas Kesehatan kab./kota dan di propinsi	<b>Tujuan/ manfaat</b>	Memberikan informasi mengenai inter-vensi dalam mencapai KB aktif 70 % dengan (proporsi laki-laki naik dari 1,3 % menjadi 2%)	Komponen 1	Pengumpulan data pelayanan KB di fasilitas kesehatan kab./kota	Komponen 2	Pertemuan koordinasi secara periodik	Komponen 3	Penyusunan rekomendasi untuk perencanaan intervensi	<b>Sub-output 2</b>	Validasi data kesehatan ibu, KB/kesehatan reproduksi mendukung pencapaian MDGs 5 baik di kab./kota maupun di provinsi.
<b>Sub-output 1</b>	Koordinasi Pelayanan KB baik di fasilitas Kesehatan kab./kota dan di propinsi												
<b>Tujuan/ manfaat</b>	Memberikan informasi mengenai inter-vensi dalam mencapai KB aktif 70 % dengan (proporsi laki-laki naik dari 1,3 % menjadi 2%)												
Komponen 1	Pengumpulan data pelayanan KB di fasilitas kesehatan kab./kota												
Komponen 2	Pertemuan koordinasi secara periodik												
Komponen 3	Penyusunan rekomendasi untuk perencanaan intervensi												
<b>Sub-output 2</b>	Validasi data kesehatan ibu, KB/kesehatan reproduksi mendukung pencapaian MDGs 5 baik di kab./kota maupun di provinsi.												

	<b>Tujuan/ manfaat</b>	Memberikan informasi perihal data yang valid, terpilah, tepat waktu dan mem-berikan masukan dalam pembuatan keputusan
	Komponen 1	Finalisasi kuesioner informasi
	Komponen 2	Pengumpulan data terpilah
	Komponen 3	Penyusunan dan analisi data
	<b>Sub-output 3</b>	Monitoring pelaksanaan program yang KB/kespro melalui supervisi fasilitatif (kesehatan reproduksi)
	<b>Tujuan/ manfaat</b>	Memberikan informasi perkembangan pelayanan KB/kesehatan reproduksi dan adanya bimbingan teknis intervensi ber-bagai permasalahan pelayanan Kesehatan reproduksi/KB di lapangan 38 kab/kota selama tahun 2011
	Komponen 1	Penyusunan materi informasi
	Komponen 2	Penyebarluasan informasi
	Komponen 3	Bimbingan teknis pelayanan Kesehatan reproduksi/KB di kab/kota
	<b>Sub-output 4</b>	Evaluasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan reproduksi /KB di provinsi
	<b>Tujuan/ manfaat</b>	Memberikan informasi teridentifikasinya permasalahan, faktor faktor penyebab dan adanya rekomendasi intervensi yg bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam pencapaian cakupan KB aktif sesuai target selama tahun 2011
	Komponen 1	Penyusunan materi evaluasi
	Komponen 2	Evaluasi pelayanan kesehatan reproduksi/KB
	Komponen 3	Penyusunan rekomendasi hasil evaluasi

<b>Anggaran Output kegiatan dalam Penurunan AKI</b>	Rp. 1.494.090.000,-
<b>Dampak/hasil yang diharapkan secara luas</b>	Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan capaian KB aktif dari 69,25% (2010) menjadi 70% (2011) dengan proporsi partisipasi laki-laki naik dari 1,3% menjadi 2 %.

**Penanggung Jawab Kegiatan**

(.....)

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kementerian

: Kementerian X

Unit Kerja

: Bina Pelaksanaan Wilayah II,  
Direktorat Jenderal XX

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Kebijakan/ Peraturan/ Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Internal	Sebab Eksternal
<p><b>Program :</b> Penyelenggaraan Jalan</p> <p><b>Output:</b> Panjang Jalan Bebas Hambatan</p> <p><b>Tujuan:</b> Terbangunnya Jalan Tol Tanjung Priok dengan memperhatikan aspek kesehatan para tenaga konstruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerja (<i>migrant</i>) diusia seksual aktif</li> <li>• Resiko penularan / HIV-AIDS diantara para pekerja konstruksi yang hidup jauh dari keluarga</li> <li>• Perilaku berisiko karena pemahaman yang kurang tentang HIV/ AIDS</li> <li>• Mobilitas tinggi para pekerja</li> <li>• Lokasi dan situasi kerja yang kondusif utk penularan (<i>man, money dan mobility</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program kegiatan abai terhadap resiko tertularnya HIV/ AIDS yang bisa dihadapi para pekerja konstruksi yang jauh dari keluarganya</li> <li>• Program kegiatan abai menyediakan akses pemeriksaan kesehatan rutin utk para pekerjanya</li> <li>• Program kegiatan abai memberikan sosialisasi rutin berkaitan dengan perilaku kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih sedikit SDM Bina Pelaksanaan Wilayah II yang mempunyai pengetahuan tentang gender dan pelaksanaan PUG untuk kegiatannya</li> <li>• Belum diketahui data pekerja yang berkaitan dengan penularan HIV/ AIDS (<i>besaran; trends, pola up date</i>)</li> <li>• Sosialisai tentang perilaku kesehatan berisiko tinggi (HIV/AIDS ) untuk para pekerja belum menjadi prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HIV-AIDS masih dipandang sebagai isu spesifik kesehatan bukan menjadi kepedulian bersama</li> <li>• Pemahaman yang masih awam diantara pekerja tentang penyakit kelamin (HIV/AIDS)</li> <li>• Masih kuat stigma-dimasyarakat tentang penyakit HIV/AIDS</li> </ul>

Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
Reformulasi Tujuan	Rincian Kegiatan/ Rencana Aksi	Baseline Data	INDIKATOR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kerjasama yang intens dengan lembaga-lembaga / para penggiat penanggulangan HIV/AIDS, misalnya untuk melakukan bersama-sama sosialisasi tentang perilaku seksual yang berbahaya.</li> <li>• <i>Capacity Building</i> (serial workshops) berkaitan dengan PUG dalam kegiatannya untuk SDM BINA Marga Wilayah II, khusus yang menangani pembangunan jalan TOL Tanjung Priok</li> <li>• Sosialisasi/ penyuluhan/ informasi mengenai perilaku beresiko penularan HIV-AIDS termasuk untuk penduduk sekitar</li> <li>• Pembangunan sistem data base yg terpilah dan <i>updated</i> dari para tenaga konstruksi pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok untuk keperluan berbagai monitoring berkaitan dengan usaha-usaha kegiatan program: <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Sosialisasi;</li> <li>☞ Pemahaman tentang HIV/AIDS</li> <li>☞ Perubahan perilaku beresiko, dst.</li> </ul> </li> <li>• Pembangunan sistem monitoring (beserta <i>self assessment</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman yang kurang tentang HIV/AIDS dan perilaku beresiko</li> <li>• Belum ada sistem data base untuk monitoring berbagai kegiatan, khususnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi pekerja (HIV/AIDS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertambah jumlah pekerja konstruksi/ penduduk lokal di sekitar (terutama perempuan) mendapat-kan informasi cukup tentang HIV/AIDS</li> <li>• Tersedia dan berfungsi sistem data base</li> </ul>

## **GENDER BUDGET STATEMENT** (Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian X**  
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal XX  
 Eselon II/Satker : Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan  
 Tanjung Priok

<b>Program</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan</b>	
<b>Kegiatan</b>	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun	
<b>Output Kegiatan Tujuan</b>	Panjang jalan bebas hambatan Pembangunan jalan bebas hambatan yang responsif terhadap kesehatan pekerja	
<b>Analisis Situasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya Pekerja Migran yang bekerja di sekitar konstruksi belum memahami isu HIV /AIDS</li> <li>• SDM Ditjen XX masih memerlukan pengetahuan dalam mengintegrasikan gender dalam kegiatan (PUG), misalnya dalam siklus perencanaan dan penganggaran.</li> <li>• Salah satu kegiatan dalam melaksanakan PUG adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang meningkatkan kesadaran dan proteksi staf dan pekerja konstruksi terhadap resiko HIV/AIDS, melalui beberapa kegiatan/rencana aksi.</li> </ul>	
<b>Rencana Aksi</b>	Komponen I	Serial workshops PUG untuk internal staf Ditjen XX yang terkait dengan penyelenggaraan jalan. Tujuan: <i>Capacity Building</i> meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melaksanakan PUG diantara para staff khususnya Ditjen XX



	Komponen 2	Sosialisasi untuk staf, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar tentang HIV/AIDS Tujuan: Meningkatkan pengetahuan, kesadaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS
	Komponen 3	Membangun sistim data base Tujuan: Membangun instrument pengumpulan data terpilah sekaligus untuk monitoring kegiatan
<b>Anggaran Output Kegiatan</b>	Rp. 932.058.100.000,-	
<b>Dampak/hasil Output Kegiatan</b>	Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang diajukan di lingkungan Ditjen XX sebagaimana tercantum dalam dokumen RKA-KL dipakai lebih efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan permasalahan isu gender dalam siklus perencanaan untuk mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS.	

**Penanggung Jawab Kegiatan**

(.....)



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA





DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER  
Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110  
No.Telp. (021) 384 2638 - 380 5563, Fax (021) 344 2032  
[www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)